PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**SEKRETARIAT DAERAH**
Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

PENGUMUMAN
Nomor: 800/1431
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Demak membuka kesempatan bagi putra putri terbaik bangsa yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan ketentuan sebagai berikut:

## I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Total alokasi formasi CPNS sebanyak **104 (seratus empat)** dengan rincian informasi terkait formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir.

Jenis kebutuhan pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dibagi menjadi:

1. Kebutuhan umum yaitu untuk pelamar yang tidak termasuk kriteria Penyandang Disabilitas;
2. Kebutuhan khusus. yaitu untuk pelamar dengan kriteria Penyandang Disabilitas.

Informasi secara lengkap terkait Formasi Jabatan dapat di akses melalui https://sscasn.bkn.go.id/ pada saat melakukan pendaftaran.

## II. PERSYARATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
   b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

d. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

f. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

   1) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

   2) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

   3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);

g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

i. Tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;

j. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

k. Pelamar yang dinyatakan lulus harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

l. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;

m. Bagi pelamar pria wanita dilarang memiliki tato dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tindik.

## III. PERSYARATAN CPNS KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Melampirkan surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajad kedisabilitasannya; dan
b. Link/tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

## IV. KETENTUAN UMUM

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
2. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
   a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
   b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda,

   yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
4. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
5. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang.

## V. KETENTUAN IZIN MENDAFTAR CPNS UNTUK PPPK PEMKAB DEMAK

1. PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang akan mendaftar CPNS wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati Demak
2. Mekanisme pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui link **bit.ly/Permohonan_izin_PPPK** dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Mengisi formulir permohonan izin mendaftar CPNS dengan ketentuan:
      - Mengisikan uraian alasan dengan detail mengapa ingin mendaftar CPNS pada Formasi dimaksud;
      - Jumlah uraian kata minimal 50 kata.
   b. Mengunggah dokumen sebagai berikut:
      1) Surat permohonan izin dari PPPK yang bersangkutan dengan wajib menyampaikan alasan mengikuti seleksi pengadaan CPNS (format terlampir);
      2) Surat rekomendasi persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan (format terlampir).
   c. Batas waktu pengajuan izin paling lambat tanggal 27 Agustus 2024.

## VI. PENGGUNAAN NILAI SKD TAHUN 2023 DALAM PENGADAAN PNS TAHUN 2024

1. Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023;
2. Pelamar dapat memilih menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
   b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
   c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024
   d. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
   e. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
   f. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi anggaran 2024.
3. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024;
4. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.
5. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024, dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

## VII. MEKANISME PENDAFTARAN CPNS

1. Pendaftaran/registrasi dilaksanakan secara online ke alamat website Portal SSCASN 2024 ***https://sscasn.bkn.go.id***
2. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, **bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian Negara / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak**;

3. **Pelamar Formasi CPNS** wajib mengunggah (upload) scan **dokumen asli** yang dibutuhkan yaitu :

   a. Pasfoto formal berlatar belakang berwarna merah;

   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

   c. Ijazah asli sesuai yang dipersyaratkan;

   d. Transkrip Nilai Asli sesuai yang dipersyaratkan;

   e. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Demak yang dibuat dengan ketikan komputer dan ditandatangani serta bermeterai Rp. 10.000,- ;

   f. Bukti Akreditasi pada BAN-PT / LAM-PT / Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

   g. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai, yang berisi tentang :

      1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
      2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
      3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
      4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
      5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

   h. Bagi Pelamar Formasi Disabilitas, melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut :

      1. Surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajad kedisabilitasannya; dan
      2. Link/tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

## VIII. JADWAL SELEKSI CPNS

| No | Kegiatan | Jadwal |
|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 19 Agustus s.d 2 September 2024 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 20 Agustus s.d. 6 September 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 20 Agustus s.d. 13 September 2024 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 14 s.d. 17 September 2024 |
| 5 | Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi | 18 s.d 28 September 2024 |
| 6 | Masa Sanggah | 18 s.d. 20 September 2024 |
| 7 | Jawab Sanggah | 18 s.d. 22 September 2024 |
| 8 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 21 s.d. 27 September 2024 |
| 9 | Penarikan data final SKD CPNS | 29 September s.d. 1 Oktober 2024 |
| 10 | Penjadwalan SKD CPNS | 2 s.d. 8 Oktober 2024 |
| 11 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS | 9 s.d. 15 Oktober 2024 |
| 12 | Pelaksanaan SKD CPNS | 16 Oktober s.d. 14 November 2024 |
| 13 | Pengolahan Nilai SKD CPNS | 23 Oktober s.d. 16 November 2024 |
| 14 | Pengumuman Hasil SKD CPNS | 17 s.d. 19 November 2024 |
| 15 | Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT | 20 November s.d 17 Desember 2024 |
| 16 | Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT | 20 s.d. 22 November 2024 |
| 17 | Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi | 23 s.d. 25 November 2024 |
| 18 | Penarikan data final SKB CPNS | 26 s.d. 28 November 2024 |
| 19 | Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT | 29 November s.d. 3 Desember 2024 |
| 20 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT | 4 s.d. 8 Desember 2024 |
| 21 | Pelaksanaan SKB CPNS | 9 s.d. 20 Desember 2024 |
| 22 | Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS | 17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025 |
| 23 | Pengumuman Hasil CPNS | 5 s.d 12 Januari 2025 |
| 24 | Masa Sanggah | 13 s.d. 15 Januari 2025 |
| 25 | Jawab Sanggah | 13 s.d. 19 Januari 2025 |
| 26 | Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah | 15 s.d. 20 Januari 2025 |
| 27 | Pengumuman Pasca Sanggah | 16 s.d. 22 Januari 2025 |

| No | Kegiatan | Jadwal |
|---|---|---|
| 28 | Pengisian DRH NIP CPNS | 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 |
| 29 | Usul Penetapan NIP CPNS | 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 |

*Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.*

## IX. KETENTUAN LAIN

1. Peserta seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
2. Pemerintah Kabupaten Demak tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CASN Tahun 2024, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CASN Tahun 2024.
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN Tahun 2024 hanya dapat dilihat dalam situs online https://sscasn.bkn.go.id, https://demakkab.go.id dan https://bkpp.demakkab.go.id.
6. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Demak berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
7. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024 melalui:
    a. Nomor 0896-5276-4893 (hanya menerima chat *WhatsApp,* tidak menerima call/ panggilan)
    b. Akun media sosial @bkppdemak (Instagram, Twitter, FB Page)
    c. Website https://demakkab.go.id dan https://bkpp.demakkab.go.id
8. Para calon pelamar/pelamar diwajibkan untuk terus memantau kanal tersebut untuk melihat pengumuman penting lainnya.

9. Segala akibat dari ketinggalan mengikuti informasi merupakan tanggung jawab masing-masing pelamar.
10. Keputusan Panitia Seleksi CASN Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Ditetapkan di Demak
Pada Tanggal 19 Agustus 2024

a.n. Bupati Demak
Sekretaris Daerah,

Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007

LAMPIRAN
PENGUMUMAN
NOMOR: 800/1431
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2024

| No | Jabatan | Pendidikan | Unit Penempatan | Jumlah Formasi | Jenis Kebutuhan | Deskripsi Pekerjaan | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 2 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA | S-1 PARIWISATA | Dinas Pariwisata | 1 | Umum | Mengidentifikasi bahan penyusunan standar destinasi Pariwisata berkelanjutan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 3 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | Umum | Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 4 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | Umum | Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 5 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK -<br>S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 1 | Umum | Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 6 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 7 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 8 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 INFORMATIKA -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN -<br>S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah | 1 | Umum | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |

| No | Jabatan | Pendidikan | Unit Penempatan | Jumlah Formasi | Jenis Kebutuhan | Deskripsi Pekerjaan | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 KEARSIPAN | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | Penyandang Disabilitas | Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan seiring perkembangan zaman. | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 10 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV KEARSIPAN - S-1 KEARSIPAN | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 | Umum | Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan seiring perkembangan zaman. | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 11 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 KEARSIPAN | Sekretariat Daerah | 1 | Umum | Melakukan kegiatan di bidang kearsipan dalam hal pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan, Layanan Arsip Statis | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 12 | ARSIPARIS TERAMPIL | D-III KEARSIPAN | Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga | 1 | Umum | Membantu dalam hal dokumentasi surat menyurat agar lalu lintas persuratan dapat berjalan lancar. | Rp 2.400.000 | Rp 3.700.000 |
| 13 | ARSIPARIS TERAMPIL | D-III KEARSIPAN | Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah | 1 | Umum | Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan seiring perkembangan zaman. | Rp 2.400.000 | Rp 3.700.000 |
| 14 | AUDITOR AHLI PERTAMA | D-IV MANAJEMEN - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | Inspektorat Daerah | 1 | Umum | Melakukan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 15 | AUDITOR AHLI PERTAMA | D-IV MANAJEMEN - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | Inspektorat Daerah | 1 | Umum | Melakukan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |

| No | Jabatan | Pendidikan | Unit Penempatan | Jumlah Formasi | Jenis Kebutuhan | Deskripsi Pekerjaan | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | FASILITATOR REHABILITASI | S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL -<br>S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING -<br>S-1 PSIKOLOGI | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | Umum | Melakukan kegiatan fasilitasi peningkatan lembaga rebabilitasi dengan melaksanakan program peningkatan kompetensi teknis dan kegiatan rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemulihan fisik dan kejiwaan penguna narkoba agar dapat melakukan kegiatan normal kembali. | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 17 | KURATOR | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL -<br>S-1 ANTROPOLOGI -<br>S-1 ARKEOLOGI -<br>S-1 ILMU SEJARAH | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan inventarisasi, katalogisasi, penelitian, mengumpulkan,menyimpan, melestarikan koleksi museum/cagar budaya sesuai prosedur yang berlaku agar benda-benda bersejarah tersebut dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang lama | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 18 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 HUKUM | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 1 | Umum | Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan mengacu pada petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 19 | PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA -<br>S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN -<br>S-1 MANAJEMEN OLAHRAGA -<br>S-1 SAINS KEOLAHRAGAAN | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan pelatih olahraga Ahli Pertama pada tataran operasional di bidang pelatihan olahraga, Perencanaan Program Keolahragaan, Pelatihan Fisik dan Motorik Peserta Latih, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga, Penanganan Kecelakaan Olahraga, Pelatihan Teknik Cabang Olahraga, Penguasaan Substansi Bidang Keolahragaan pada kualifikasi profesional tingkat dasar | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 20 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK LINGKUNGAN -<br>D-IV ARSITEKTUR -<br>D-IV TEKNIK SIPIL -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 ARSITEKTUR -<br>S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1 | Umum | Sebagai pelaksana teknis fungsional kegiatan Penatakelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman pada Instansi Pemerintah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 21 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK LINGKUNGAN -<br>D-IV ARSITEKTUR -<br>D-IV TEKNIK SIPIL -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 ARSITEKTUR -<br>S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Umum | Sebagai pelaksana teknis fungsional kegiatan Penatakelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman pada Instansi Pemerintah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 22 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | D-IV ARSITEKTUR -<br>D-IV TEKNIK SIPIL -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 ARSITEKTUR | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1 | Umum | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 23 | PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN | D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN -<br>D-IV ILMU KELAUTAN -<br>S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN -<br>S-1 TEKNOLOGI KELAUTAN -<br>S-1 PERIKANAN -<br>S-1 TEKNIK KELAUTAN -<br>S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN -<br>S-1 PERIKANAN BUDIDAYA | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 | Umum | Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |

| No | Jabatan | Pendidikan | Unit Penempatan | Jumlah Formasi | Jenis Kebutuhan | Deskripsi Pekerjaan | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan | 1 | Umum | Melakukan kegiatan Pengelola Layanan Kesehatan dengan cara menyiapkan dan melaksanakan program kerja, koordinasi, menyampaikan informasi, pelacakan dan pengawasan, menyiapkan penyusunan juknis/juklak, menyusun laporan kegiatan dan melaksanakan tugas lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 25 | PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL -<br>S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING -<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 SOSIOLOGI -<br>S-1 ILMU KOMUNIKASI | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan /atau keluarga korban | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 26 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Kebonagung | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 27 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Karanganyar | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 28 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Gajah | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 29 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Demak - Kelurahan Kalicilik | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 30 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Sekretariat Daerah | 1 | Umum | Melakukan kegiatan penelaahan di bidang Otonomi Daerah, Administrasi Pemerintahan Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, menganalisis, mengonsep dan menyusun nota dinas atau telaah staf sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas. | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 31 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Wonosalam | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 32 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Karangawen | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 33 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Mijen | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 34 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Bonang | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 35 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Demak - Kelurahan Kadilangu | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 36 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Guntur | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |

| No | Jabatan | Pendidikan | Unit Penempatan | Jumlah Formasi | Jenis Kebutuhan | Deskripsi Pekerjaan | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Demak - Kelurahan Singorejo | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 38 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Dempet | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 39 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Wonosalam | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 40 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Demak | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 41 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Wedung | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 42 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Demak - Kelurahan Mangunjiwan | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 43 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Wedung | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 44 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Demak - Kelurahan Betokan | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 45 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Kebonagung | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 46 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Mijen | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 47 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Karanganyar | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 48 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Gajah | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 49 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Dempet | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 50 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Karangtengah | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 51 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Mranggen | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 52 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Demak | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 53 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Sayung | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 54 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Guntur | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |

| No | Jabatan | Pendidikan | Unit Penempatan | Jumlah Formasi | Jenis Kebutuhan | Deskripsi Pekerjaan | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Karangawen | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 56 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Demak - Kelurahan Bintoro | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 57 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Karangtengah | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 58 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Bonang | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 59 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Mranggen | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 60 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Kecamatan Sayung | 1 | Umum | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 61 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman ModaL | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 62 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Sekretariat Daerah | 1 | Umum | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 63 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Kesehatan - Puskesmas Dempet | 1 | Umum | Pengelola TI | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 64 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Kesehatan - Puskesmas Demak I | 1 | Umum | Pengelola TI | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 65 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Kesehatan - Puskesmas Kebonagung | 1 | Umum | Pengelola TI | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |

| No | Jabatan | Pendidikan | Unit Penempatan | Jumlah Formasi | Jenis Kebutuhan | Deskripsi Pekerjaan | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | Umum | Menelaah dan menganalisa objek kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 67 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Umum | Menelaah dan menganalisa objek kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 68 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Sekretariat Daerah | 1 | Penyandang Disabilitas | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 69 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan dukungan pengelolaan sistem dan teknologi informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 70 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Sekretariat Daerah | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan dukungan pengelolaan sistem dan teknologi informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 71 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Sekretariat Daerah | 1 | Umum | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |

| No | Jabatan | Pendidikan | Unit Penempatan | Jumlah Formasi | Jenis Kebutuhan | Deskripsi Pekerjaan | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA | D-IV MANAJEMEN -<br>D-IV PSIKOLOGI -<br>D-IV SOSIOLOGI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 PSIKOLOGI -<br>S-1 KESEHATAN MASYARAKAT -<br>S-1 SOSIOLOGI | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan Pengembangan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 73 | PENATA KEPROTOKOLAN | D-IV ADMINISTRASI NEGARA -<br>D-IV KOMUNIKASI MASSA -<br>D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK -<br>S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA -<br>S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI -<br>S-1 SASTRA INGGRIS -<br>S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG -<br>S-1 BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK -<br>S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN ARAB -<br>S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS -<br>S-1 SASTRA TIONGKOK -<br>S-1 SASTRA JEPANG -<br>S-1 SASTRA KOREA -<br>S-1 SASTRA ARAB -<br>S-1 SASTRA PERANCIS -<br>S-1 SASTRA BELANDA -<br>S-1 SASTRA RUSIA -<br>S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 ILMU KOMUNIKASI -<br>S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL -<br>S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT -<br>S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN BELANDA -<br>S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JERMAN -<br>S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN PERANCIS -<br>S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN RUSIA -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK -<br>S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | Sekretariat Daerah | 1 | Umum | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang protokol | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 74 | PENATA KEPROTOKOLAN | D-IV KOMUNIKASI MASSA -<br>S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI -<br>S-1 ILMU KOMUNIKASI -<br>S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL -<br>S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | Sekretariat DPRD | 1 | Umum | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang protokol | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 75 | PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 HUKUM | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | Umum | Melaksanakan Perencanaan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan. | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |

| No | Jabatan | Pendidikan | Unit Penempatan | Jumlah Formasi | Jenis Kebutuhan | Deskripsi Pekerjaan | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | PENATA RUANG AHLI PERTAMA | D-IV GEOGRAFI -<br>D-IV TEKNIK GEODESI -<br>D-IV ARSITEKTUR -<br>D-IV PLANOLOGI -<br>D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA -<br>D-IV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA -<br>S-1 TEKNIK GEODESI -<br>S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA -<br>S-1 ARSITEKTUR -<br>S-1 GEOGRAFI -<br>S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA -<br>S-1 PLANOLOGI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Umum | Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 77 | PENELITI AHLI PERTAMA | S-2 ADMINISTRASI PUBLIK -<br>S-2 EKONOMI TERAPAN -<br>S-2 SAINS MANAJEMEN -<br>S-2 SOSIOLOGI -<br>S-2 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | Umum | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 78 | PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI -<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 HUKUM | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 | Umum | Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, perijinan, keanggotaan, peraturan dan penerapan sanksi | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 79 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK KIMIA | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | Umum | Menghimpun dan mengendalikan data serta informasi mengenai kulitas dan kuantitas dampak lingkungan sesuai prosedur untuk menyusun konsep rencana kegiatan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 80 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK KIMIA | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | Umum | Menghimpun dan mengendalikan data serta informasi mengenai kulitas dan kuantitas dampak lingkungan sesuai prosedur untuk menyusun konsep rencana kegiatan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 81 | PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA | D-IV PETERNAKAN -<br>D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN -<br>S-1 ILMU PETERNAKAN -<br>S-1 INDUSTRI PETERNAKAN -<br>S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK -<br>S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 1 | Umum | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 82 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 EKONOMI -<br>D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK -<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Inspektorat Daerah | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 83 | PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 TRANSPORTASI DARAT -<br>S-1 TEKNIK MESIN -<br>S-1 TEKNIK KESELAMATAN | Dinas Perhubungan | 1 | Umum | Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang transportasi | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 84 | PENGELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | D-III TEKNISI PERPUSTAKAAN -<br>D-III TEKNIK ELEKTRO ARUS LEMAH -<br>D-III MANAJEMEN LOGISTIK DAN MATERIAL -<br>D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN -<br>D-III TEKNIK PERKAPALAN -<br>D-III TEKNIK ELEKTRO -<br>D-III TEKNIK PENERBANGAN | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | Umum | Mengelola, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, dan mengevaluasi peralatan, logistik, sarana dan peralatan siaga, dan perangkat komunikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pelatihan Pencarian dan Pertolongan | Rp 2.400.000 | Rp 3.700.000 |

| No | Jabatan | Pendidikan | Unit Penempatan | Jumlah Formasi | Jenis Kebutuhan | Deskripsi Pekerjaan | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | PENGELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | D-III TEKNISI PERPUSTAKAAN - D-III MANAJEMEN LOGISTIK DAN MATERIAL - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNIK ELEKTRO | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | Umum | Mengelola, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, dan mengevaluasi peralatan, logistik, sarana dan peralatan siaga, dan perangkat komunikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pelatihan Pencarian dan Pertolongan | Rp 2.400.000 | Rp 3.700.000 |
| 86 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Umum | Jabatan Fungsional Pengelola SDA adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional Pengelolaan Sumber Daya Air | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 87 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 BIOLOGI | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | Umum | Menghimpun dan mengendalikan data serta informasi mengenai kulitas dan kuantitas dampak lingkungan sesuai prosedur untuk menyusun konsep rencana kegiatan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 88 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 89 | PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | Umum | Penyuluhan Hukum | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 90 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK INDUSTRI | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 | Umum | Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 91 | PERENCANA AHLI PERTAMA | D-IV AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 SOSIOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | Umum | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 92 | PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | Sekretariat DPRD | 1 | Umum | Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknik dan pedoman pemberian dukungan kesekretariatan serta tugas teknis di bidang persidangan dan risalah | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 93 | PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | D-III PKB - D-III LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | Dinas Perhubungan | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan operasional di bidang transportasi | Rp 2.400.000 | Rp 3.700.000 |
| 94 | POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan Patroli, Pengamanan, Pengendalian massa, dan deteksi dini | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |

| No | Jabatan | Pendidikan | Unit Penempatan | Jumlah Formasi | Jenis Kebutuhan | Deskripsi Pekerjaan | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | Umum | Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan system informasi berbasis komputer | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 96 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF -<br>D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI -<br>D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN -<br>D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK -<br>D-IV SISTEM SIBER-FISIK -<br>D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS -<br>D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 ILMU KOMPUTASI -<br>S-1 SAINS KOMPUTASI -<br>S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER -<br>S-1 REKAYASA KOMPUTER -<br>D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK ELEKTRO -<br>S-1 REKAYASA ELEKTRO | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | Umum | Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan system informasi berbasis komputer | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 97 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Pariwisata | 1 | Umum | Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan system informasi berbasis komputer | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |

| No | Jabatan | Pendidikan | Unit Penempatan | Jumlah Formasi | Jenis Kebutuhan | Deskripsi Pekerjaan | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA -<br>D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI -<br>D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS -<br>D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK -<br>D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU KOMPUTASI -<br>D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 | Umum | Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan system informasi berbasis komputer | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 99 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Umum | Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan system informasi berbasis komputer | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 100 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga | 1 | Umum | Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan system informasi berbasis komputer | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 101 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 1 | Umum | Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan system informasi berbasis komputer | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 102 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | Dinas Pertanian dan Pangan | 1 | Umum | Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan system informasi berbasis komputer | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 103 | PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN -<br>S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan dibidang kepustakawanan, yang meliputi pengelolaan peprustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |
| 104 | SANDIMAN AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER -<br>S-1 SISTEM KOMPUTER | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Umum | Melaksanakan kegiatan kebijakan persandian, analisis dan riset persandian dan manajemen persandian | Rp 2.700.000 | Rp 4.200.000 |

a.n. Bupati Demak
Sekretaris Daerah,



Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007

**FORMAT :**
**SURAT PERMOHONAN IZIN MENDAFTAR SELEKSI CPNS**

Demak, Agustus 2024

Perihal : Permohonan Izin Mendaftar CPNS.

Kepada
Yth. Bupati Demak
di Demak

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| NI PPPK | : | |
| Golongan | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jabatan | : | |
| Masa kerja PPPK | : | ..... tahun .....bulan |
| OPD Tempat tugas | : | ..... |

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk mendaftar seleksi CPNS Formasi Jabatan..... pada instansi ..... dengan alasan sebagai berikut :
.....
.....
.....
.....

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya bersedia menanggung konsekuensi apabila dikemudian hari keterangan yang saya sampaikan tidak benar, atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Pemohon

.....

**FORMAT :**
**SURAT PERNYATAAN REKOMENDASI/PERSETUJUAN MENDAFTAR CPNS**

# KOP DINAS

Demak, Agustus 2024

Nomor : .....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Mendaftar CPNS

Kepada
Yth. Bupati Demak
di Demak

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa PPPK yang tersebut di bawah ini:

Nama :
NI PPPK :
Golongan :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit kerja :

Direkomendasikan/disetujui untuk mendaftar seleksi penerimaan CPNS Formasi Tahun 2024

Demikian surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk bahan pertimbangan. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensi yang ditimbulkan dan bersedia tidak mengajukan tambahan/pengganti kebutuhan pegawai apabila yang bersangkutan diterima sebagai CPNS.

Kepala OPD

Nama
Pangkat/golongan
NIP

# CONTOH
# SURAT LAMARAN

……..’ ……

Kepada

Lampiran : 1 bendel
Perihal : **Pendaftaran CPNS Pemerintah Kabupaten Demak Formasi Tahun 2024**

**Yth. Bupati Demak**
di_
D E M A K

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ..... |
| Tempat, tanggal lahir | : | ..... |
| Jenis kelamin | : | ..... |
| Alamat | : | ..... |
| Nomor HP/WA. | : | ..... |
| Alamat email | : | ..... |

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Formasi Tahun 2024.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir saya sampaikan dokumen yang diunggah melalui https://sscasn.bkn.go.id, dan saya bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang saya unggah, serta bersedia dinyatakan gugur dan menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang saya unggah tidak sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Bermeterai
Rp. 10.000,-

Ttd

( nama terang )

# CONTOH

# SURAT PERNYATAAN 5 POIN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| Tempat, tanggal lahir | : |
| Agama | : |
| Alamat | : |

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS / PNS atau Anggota TNI / POLRI;
4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., .....

Yang membuat,

Bermeterai

Rp.10.000,-

ttd

( nama terang )